

Kegagalan Imitasi Strategi Global: Kasus Gerakan *Occupy* Jakarta

Dias Pabyantara Swandita Mahayasa

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: diaspabyantara@gmail.com

Abstract

Occupy Wallstreet movement in the United States of America brought an awareness about economic imbalances of the world. As real indicator, they are many movements in some countries imitating Occupy Wallstreet movement. In Indonesia, such movement situated in Jakarta whose slogan Occupy Jakarta. This article analyzes the failure of Occupy Jakarta as the imitation of Occupy Wallstreet movement. The main argument proposed that visibility strategy used by Occupy Wallstreet was applied without considering local reality in Jakarta. Using CAGE analysis from Ghemawat, this article found that the failure of Occupy Jakarta due to its failure in identifying the main problem in Indonesia, which are agrarian conflict and corruption. The main focus of Occupy Jakarta was against the share holder that did not get public attention so that this movement turn into its failure.

Gerakan *Occupy Wallstreet* di Amerika Serikat telah membawa kesadaran mengenai ketimpangan ekonomi di dunia. Indikasinya banyak muncul gerakan serupa di berbagai negara yang melakukan imitasi gerakan *Occupy Wallstreet*. Di Indonesia, gerakan serupa dapat ditemui di Jakarta yang menggunakan slogan *Occupy Jakarta*. Tulisan ini menganalisis kegagalan gerakan *Occupy Jakarta* sebagai imitasi gerakan *Occupy Wallstreet*. Argumen utama yang diajukan bahwa strategi *visibility* yang digunakan oleh *Occupy Wallstreet* diaplikasikan tanpa memperhatikan realitas lokal yang terjadi di Jakarta. Menggunakan analisis CAGE dari Ghemawat, tulisan ini menemukan bahwa kegagalan gerakan *Occupy Jakarta* disebabkan oleh kegagalannya dalam mengidentifikasi permasalahan utama di Indonesia, yakni konflik agrarian dan persoalan korupsi. Fokus dari gerakan *Occupy Jakarta* adalah menyerang pemilik saham yang tidak menjadi perhatian masyarakat sehingga gerakan ini mengalami kegagalan.

Kata-kata Kunci: *Occupy Jakarta; CAGE; visibility; Masyarakat Sipil Global*

Teorisi hiperglobalis¹ mengenai urgensi dimensi geografi yang semakin berkurang tidak sepenuhnya benar.² Pandangan ini setidaknya didasarkan pada konsepsi Hardt & Negri mengenai kemunculan *empire*³ dalam globalisasi. Dalam penjelasannya kemunculan *empire* akan diikuti dengan kemunculan *multitude*⁴ sebagai konsekuensi dari resistensi terhadap power *empire*. Hardt & Negri melihat fenomena munculnya *multitude* sebagai bentuk dari pergerakan Masyarakat Sipil Global (MSG). Scholte dan Edelman menyatakan strategi pergerakan masyarakat sipil global dicirikan dengan empat model yaitu *visibility*, *audibility*, *lobbying* serta *networking*.⁵ Penggunaan salah satu strategi di atas harus didasari dengan pertimbangan terhadap kondisi lokal yang dihadapi oleh MSG. Tulisan ini mengelaborasi argumen tersebut dengan menggunakan contoh kasus Gerakan *Occupy* Jakarta sebagai representasi Masyarakat Sipil Global. Argumen yang diajukan adalah tidak efektifnya Gerakan *Occupy* Jakarta dikarenakan strategi Global *visibility* yang *dicopy-paste* dari gerakan induknya digunakan tanpa memperhatikan konteks lokal perlawanannya. Hal ini mengkonfirmasi argumen Ghemawat bahwa *global strategy* seharusnya berfokus pada perbedaan yang ada dalam konteks lintas batas negara.⁶ Tujuan akhir dari tulisan ini adalah melihat signifikansi CAGE analisis dari Ghemawat dalam kegagalan strategi global dari gerakan *Occupy* Jakarta.

Strategi Perlawanan Gerakan *Occupy* Jakarta: *Visibility*

Scholte dan Edelman setidaknya membagi kategorisasi model pergerakan Masyarakat Sipil Global menjadi empat, yakni *visibility*, *audibility*, *lobbying* serta *networking*. Strategi *visibility* dan *audibility* adalah model strategi yang sifatnya dapat ditangkap oleh indra penglihatan dan pendengaran. Model kegiatannya dapat berupa demonstrasi atau menggunakan media massa sebagai media publikasi. Sasaran dari strategi ini adalah *recognition* dari masyarakat luas. Biasanya dilakukan oleh masyarakat sipil yang masuk dalam kategori *Resource Mobilization* atau masyarakat sipil yang agendanya adalah mengontrol dan mengkritisi agenda pemerintah. Kemudian strategi *lobbying*, adalah proses negosiasi dilakukan kepada agensi politik formal oleh masyarakat sipil global dan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat sipil global dalam kategori *new social movement* karena keselarasan agendanya dengan agenda pemerintah. Strategi ini dilakukan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan agendanya dengan agenda pemerintah agar tercipta harmonisasi kerja dalam praktiknya. Yang terakhir adalah *networking* sebagai strategi masyarakat sipil global. *Networking* ini merujuk pada penguatan koneksi antar komunitas *grassroot* yang kemudian membentuk jaringan-jaringan antar kelompok dalam level *grassroot*.⁷

Dalam beberapa hal, gerakan *Occupy* Jakarta menggunakan strategi *visibility*. Model pergerakannya menggunakan mobilisasi massa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Model strategi *visibility* dari Gerakan *Occupy* Jakarta ini juga diikuti dengan penekanan prinsip *commonality* sebagai penanda identik dengan Gerakan *Occupy Wallstreet* di Amerika Serikat. Identifikasi kedua pergerakan ini didasari pada dua aspek *commonality* dan tujuan perlawanan.⁸ *Commonality* adalah absennya struktur organisasional dalam suatu model pergerakan sehingga yang menjadi ikatan adalah solidaritas dan kesamaan tujuan. Dalam gerakan OW tidak terbentuk struktur organisasional yang hierarkis. Keputusan-keputusan yang menyangkut pergerakan diputuskan melalui forum yang bebas dihadiri oleh siapa saja dengan menganut *direct democracy*. Selanjutnya tujuan perlawanan *Multitude* adalah *Empire* yang diasosiasikan dengan sistem produksi kapitalistik dan globalisasi neoliberal.⁹ Gerakan *Occupy Wallstreet* menggunakan kedua strategi ini. Pergerakannya tidak didasari oleh struktur hierarki organisasional yang baku. Setiap keputusan yang berhubungan dengan pergerakan diambil melalui forum terbuka. Kemudian tujuannya adalah melawan globalisasi neoliberal, sistem produksi kapitalistik yang disimbolkan dengan *Wallstreet*.

Gerakan *Occupy* Jakarta juga menggunakan strategi yang sama dengan Gerakan *Occupy Wall Street* yaitu menggunakan *communality* sebagai strategi untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap simbol-simbol globalisasi neoliberal.¹⁰ Menurut Bastian, gerakan ini mempunyai kesamaan mulai dari model pergerakan, konsep pergerakan, sampai slogan yang digunakan sama dengan gerakan *Occupy Wall Street*.¹¹ Kemudian Putri, juga menjelaskan bahwa gerakan ini didasarkan pada multi identitas dimana protes yang hadir berasal dari ibu rumah tangga, dosen, peneliti, mahasiswa dan pekerja seni.¹² Kemudian Rachman, menjabarkan bahwa secara berkala pergerakan ini mengadakan forum terbuka untuk membahas arah pergerakan selanjutnya.¹³ Forum ini terbuka bagi siapapun yang bersedia hadir untuk membahas kelanjutan pergerakan Gerakan *Occupy* Jakarta. Kemudian target yang dijadikan sasaran protes juga merujuk pada simbol-simbol globalisasi neoliberal, yaitu pusat-pusat perekonomian di suatu negara. Di Indonesia, gerakan *Occupy* Jakarta melakukan aksi protesnya di depan Kantor Bursa Efek Jakarta. Beberapa indikator di atas dapat ditemui dalam tipikal gerakan *Occupy* yang terjadi di seluruh belahan dunia.¹⁴ Strategi yang menekankan *commonality* dipraktikkan dalam semua aktivitas protes yang mengambil *tagline* Gerakan *Occupy*. Adaptasi strategi yang sifatnya global ini ternyata tidak efektif dalam konteks Gerakan *Occupy* Jakarta.

Inefektivitas Global Strategy Protes *Occupy* Jakarta: Analisis CAGE

Mengukur efektivitas pergerakan MSG setidaknya bisa dilihat dari dua aspek, yakni kesesuaian antara target pergerakan dan efek yang dihasilkan setelah pergerakan, yang kedua adalah berapa lama MSG dapat bertahan.¹⁵ Dalam gerakan *Occupy* Jakarta, kedua aspek tersebut tidak memenuhi kualifikasi efektif. Dari poin yang pertama, target dari gerakan ini adalah untuk melawan sistem kapitalistik yang dianggap merugikan 99% warga Indonesia. Namun gerakan protes yang dilakukan di depan gedung Bursa Efek Jakarta tidak memunculkan efek apapun dari segi ekonomi. Poin kedua, dari durasi waktu yang ada, gerakan ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan selebihnya hanya *noise* di sosial media.¹⁶ Jika dibandingkan antara gerakan *Occupy Wallstreet* yang masih mendapat respon dari Pemerintah Amerika Serikat sampai setidaknya bulan Desember 2012,¹⁷ *Occupy* Jakarta hanya direspon selama dua bulan oleh Pemerintah Indonesia.¹⁸ Kedua poin ini mengindikasikan inefektivitas dari strategi yang digunakan oleh *Occupy* Jakarta. Inefektivitas ini disebabkan oleh penerjemahan strategi global gerakan *Occupy* tidak memperhatikan konteks lokal yang ada di Indonesia.

Menganalisis korelasi antara strategi global dan lokal, Ghemawat memberikan formulasi analisis dimensi *culture, administrative, geographic* dan *economic* (CAGE). Formulasi Ghemawat dalam CAGE ini dirumuskan dengan membayangkan konteks bisnis. Namun melihat poin-poin yang disampaikan Ghemawat memetakan hubungan antara negara *host* dan negara *home* dalam industri, secara umum dapat digunakan dalam melihat persebaran ide pergerakan dalam dua negara. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar dari penyebaran ide pergerakan yang sama dengan nilai marketing dari bisnis, dimana kedua aktivitas ini bertujuan sama yaitu menyebarkan produk. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana aplikasi dari elemen CAGE dalam melihat kegagalan dari imitasi strategi global *Wallstreet* oleh *Occupy* Jakarta karena dari awal segi *culture* dan *economic* tidak terdapat kesamaan. Hal ini menyebabkan strategi yang sama tidak dapat menarik masa sebagai bentuk penyebaran ide pergerakannya.¹⁹

Dimensi Cultural: Different Dispositon

Strategi global *Occupy Wallstreet* tidak efektif dalam pergerakan serupa di Jakarta karena perbedaan kultur antara negara *host* dan *home* dimana ide pergerakan tersebut berasal. Ghemawat menjelaskan bahwa kecenderungan permasalahan yang berbeda antara negara *host* dan *home* mengharuskan penyesuaian strategi antar wilayah.²⁰ Dalam gerakan *Occupy* Jakarta strategi *visibility* dengan melakukan protes di depan Bursa

Efek Jakarta tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Strategi ini lebih merupakan imitasi dari strategi yang dilakukan oleh Gerakan *Occupy Wallstreet* di Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan umum yang dialami oleh mayoritas penduduk Indonesia bukan pada sistem ekonomi, tapi pada persoalan agraria dan persoalan korupsi.²¹ Persoalan agraria, secara statistik 69% dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku konfliknya dengan total luas lahan sengketa 2,1 juta hektar.²² Sebesar 50% dari tipologi konflik agraria yang terjadi melibatkan komunitas lokal dan korporasi.²³ Selain sengketa tanah, persoalan agraria juga menyangkut permasalahan perumahan. Di DKI Jakarta tahun 2011, 392 rukun warga dengan luas 3119,16 hektar termasuk kategori kumuh.²⁴ Sedangkan dari sisi korupsi, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara.²⁵ Sedangkan dalam peringkat dunia, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 117 negara yang disurvei.²⁶ Ditambah lagi, di Indonesia dugaan praktik korupsi yang dirilis oleh KPK sebanyak 620 kasus dan yang sudah dieksekusi sebanyak 260 kasus.²⁷

Jika dibandingkan, urgensi masalah agraria dan korupsi jika dibandingkan dengan permasalahan sistem ekonomi Indonesia terpisah jauh. Gerakan *Occupy* Jakarta melakukan protesnya di depan Gedung Bursa Efek Jakarta yang dianggap representasi sistem ekonomi kapitalistik.²⁸ Sedangkan data statistik menyebutkan hanya 0,24% penduduk Indonesia pada tahun 2011 yang melakukan bisnis saham.²⁹ Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan permasalahan agraria dan korupsi di Indonesia. Kedua persoalan di atas setidaknya mengindikasikan penyebab kegagalan strategi *visibility* gerakan *Occupy* Jakarta. Protes yang dilakukan di depan Gedung Bursa Efek Jakarta tidak mengenai substansi atau akar permasalahan. Jika dibandingkan dengan Gerakan *Occupy Wallstreet*, gerakan ini melakukan protes di wilayah *Wallstreet* sebagai pusat kegiatan ekonomi di Amerika Serikat. Setidaknya pemilihan tempat protesnya memiliki dasar argumentasi. Sedangkan di Indonesia, perusahaan yang disebut paling eksploitatif adalah perusahaan Migas,³⁰ sehingga tidak efektif jika memprotes perusahaan Migas di depan Gedung Bursa Efek.

Dimensi *Economic: Rich and Poor Differences*

Selain persoalan di atas, salah satu argumen mengenai kegagalan strategi *Occupy* Jakarta adalah masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat berbeda secara kesadaran ideologis. Masyarakat Indonesia menurut Lane memandang bahwa kemiskinan dan persoalan eksploitasi menjadi hal yang wajar karena diskursus mengenai Indonesia adalah negara miskin.³¹ Paradigma yang berkembang adalah wajar ketika seseorang miskin berada di negara yang miskin. Sedangkan di AS, perbedaan yang mendasar ada

dalam cara pandang terhadap fenomena. Masyarakat Amerika Serikat menilai bahwa negara Amerika Serikat adalah negara besar, kaya, makmur dan maju, sehingga menjadi miskin di negara kaya adalah hal yang salah. Perbedaan ideologis dalam memandang masalah ini kemudian mengarah pada perbedaan kesadaran yang muncul. Dalam kasus *Occupy Wallstreet*, strategi *visibility* yang digunakan mendapat simpati dan dukungan massa yang banyak. Sedangkan dalam kasus *Occupy Jakarta*, dukungan publik tidak muncul karena dari awal persepsi yang muncul berbeda. Secara umum, gerakan *Occupy Jakarta* hanya mengimitasi strategi dan ideologi dari gerakan *Occupy Wallstreet*. Konteks perlawanan yang seharusnya sangat lokal tidak diperhatikan dalam menyusun strategi perlawanannya. Ditambah lagi, tujuan dari strategi *visibility* adalah menarik perhatian dari publik untuk mendukung tujuan perlawanan MSG. Dalam konteks ini publik Indonesia tidak terlalu konsen dengan permasalahan sistem ekonomi. Penjelasan di atas setidaknya mengkonfirmasi logika berpikir Ghemawat mengenai analisis CAGE. Dari penjelasan di atas kegagalan strategi *visibility* gerakan *Occupy Jakarta* karena tidak memperhitungkan dimensi *cultural* dan *economic* dari analisis CAGE Ghemawat. Persoalan agraria dan korupsi adalah refleksi dari identitas nasional Indonesia sebagai negara agraris dan negara dengan sistem birokrasi yang korup. Kedua identitas nasional ini yang kemudian mengarahkan pemahaman publik kepada permasalahan utama di Indonesia, bukan merupakan sistem produksi kapitalistik, melainkan persoalan agraria dan korupsi. Dengan kata lain, kegagalan strategi *visibility* oleh gerakan *Occupy Jakarta* untuk menarik atensi publik adalah karena faktor kultural yang mempersepsi identitas nasional Indonesia bukan kapitalisme yang ditentang oleh *Occupy Jakarta* melainkan faktor agraria dan korupsi.

The (Arguably) Right Strategy

Pertanyaan mengenai pilihan strategi yang paling tepat akan memicu perdebatan panjang. Definisi mengenai strategi yang tepat bisa jadi sangat kontekstual tergantung dari problematika yang dihadapi.³² Menurut Porter, strategi merupakan hasil dari *performing different activities with a different way*.³³ Definisi Porter mengenai strategi tersebut membuat konteks strategi menjadi sangat lokal. Pertimbangan untuk merumuskan strategi menjadi sangat lokal. Generalisasi dari fenomena lintas negara yang menjadi implikasi dari globalisasi tetap harus dimaknai dalam konteks lokalitas. Hal ini yang kemudian membuat strategi *visibility* dari Gerakan *Occupy Jakarta* tidak secara efektif mampu dilaksanakan.

Setelah menganalisis kegagalan strategi *visibility* Gerakan *Occupy Jakarta*, pertanyaannya kemudian, strategi apa yang paling rasional untuk digunakan dalam konteks perlawanan di Indonesia? Seperti dijelaskan pada

bagian sebelumnya, bahwa melihat derajat strategis dari sebuah strategi bisa menjadi sangat kontekstual, bahkan hampir tidak mungkin ditarik generalisasi dari sebuah strategi. Menghadapi persoalan ini, salah satu yang bisa dilakukan untuk menilai derajat strategis suatu strategi adalah dengan memetakan kemungkinan strategi yang diambil sesuai dengan situasi yang telah dan mungkin muncul. Terkait dengan hal ini berdasarkan teorisasi strategi dari Scholte dan Edelman mengenai *visibility*, *audibility*, *lobbying* serta *networking*, pada bab ini dibahas bahwa dalam konteks *Occupy Wallstreet*, strategi *lobbying* adalah yang paling mungkin mencapai inti permasalahan daripada ketiga teorisasi strategi pergerakan masyarakat sipil global lainnya.

Penjelasan pada sub-bab sebelumnya telah membuktikan bahwa strategi *visibility* dari gerakan *Occupy* Jakarta tidak mampu mencapai inti permasalahan di Indonesia. Argumennya adalah karena atensi masyarakat Indonesia tidak berada pada bidang kapitalisme melainkan pada permasalahan agraria dan korupsi. Argumen ini juga berlaku untuk strategi *audibility*. Secara esensial strategi *audibility* melihat dimensi yang sama dengan strategi *visibility*, yaitu atensi dari publik untuk mendukung pergerakan yang dilakukan. Perbedaannya hanya terdapat pada model pergerakannya. Jika dalam strategi *visibility* pergerakan dilakukan dengan melakukan demonstrasi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, dalam strategi *audibility* tujuannya sama untuk menarik atensi publik namun caranya dengan mengadakan seminar dan diskusi terkait isu-isu yang menjadi tujuan perlawanannya. Kedua strategi ini tidak secara efektif dapat dilakukan oleh Gerakan *Occupy* Jakarta karena secara kultural atensi publik terhadap kegiatan seminar dan kegiatan akademik masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Berdasarkan data statistik, jumlah kelas pekerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebanyak 5,5 juta pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 7,94 juta pada tahun 2013. Jumlah ini terpaut jauh dengan penduduk dengan tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK yang mencapai hampir 100 juta orang dan meningkat menjadi 110 juta orang pada tahun 2013.³⁴ Dengan asumsi bahwa seminar dan kegiatan akademik di Indonesia didominasi oleh lulusan perguruan tinggi maka dapat dikatakan strategi *audibility* tidak akan efektif jika digunakan dalam konteks Indonesia. Hal ini dikarenakan atensi publik lulusan perguruan tinggi berjumlah 2% dari total populasi yang mengikuti jalur pendidikan formal. Kemudian strategi masyarakat sipil global menurut Scholte dan Edelman adalah strategi *networking*. Strategi ini digunakan oleh gerakan *May Day* dalam praktik protesnya. Dalam gerakan *May Day* tidak ada komando tunggal namun ada kesepakatan dan konsensus mengenai waktu pelaksanaan dan model protes yang dilakukan. Kesatuan jaringan untuk membentuk satu model protes yang sama. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah kesamaan persoalan yang dihadapi karena aturan-aturan dalam melakukan gerakan ditarik dari konsensus yang terjalin melalui kesamaan visi dan konteks permasalahan per-

lawan yang dihadapi. Gerakan *May Day* mampu melaksanakan strategi-strategi ini dengan efektif karena permasalahan yang dialami buruh di negara berkembang relatif sama, yaitu persoalan mendudukan hak dan kewajiban buruh dalam porsi yang seimbang dalam proses produksi. Namun strategi ini tidak dapat dijalankan secara efektif oleh Gerakan *Occupy* Jakarta karena kembali lagi pada permasalahan yang dihadapi relatif berbeda. Strategi ini mensyaratkan kesamaan *background* perlawanan yang sama dari setiap gerakan lintas negara.³⁵ Dalam gerakan *Occupy* Jakarta, yang merumuskan strategi berasal dari konteks permasalahan dan kultur negara maju, yaitu Gerakan *Occupy Wallstreet* di Amerika Serikat. Ketika dijalin konsolidasi dengan menyamakan model pergerakan akan terjadi kesenjangan persoalan antara *Occupy* Jakarta yang menghadapi permasalahan agraria dan korupsi dengan *Occupy Wallstreet* yang menghadapi permasalahan sistem produksi kapitalistik.

Kemungkinan kegagalan ketiga strategi tersebut untuk digunakan dalam konteks perlawanan *Occupy* Jakarta dikarenakan ketidaksesuaian ketiga strategi tersebut dalam merespon permasalahan lokal yang ada di Indonesia. Persoalan agraria dan korupsi bersumber dari persoalan dalam struktur birokrasi di Indonesia.³⁶ Persoalan agraria menurut Budiarto bersumber dari pengesahan Undang-Undang terkait reformasi agraria yang disahkan pada tahun 2013 lalu. Sedangkan korupsi lebih kepada persoalan melakukan manipulasi terhadap birokrasi. Kedua persoalan ini adalah persoalan yang besumber pada birokrasi sehingga respon paling rasional adalah melalui jalur birokrasi. Terkait dengan hal tersebut, bahwa sifat dasar masyarakat sipil global adalah tidak berada dalam negara dan pasar maka tidak mungkin untuk gerakan *Occupy* Jakarta masuk ke dalam jalur birokratik untuk merubah kebijakan atau menyalurkan kepentingannya.³⁷

Dari sini kemudian strategi *lobbying* oleh masyarakat sipil global menemukan arti pentingnya. Dalam strategi *lobbying*, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan *lobby* kepada agen politik formal, tidak hanya pemerintah namun juga partai-partai politik yang ada. Strategi ini dipakai oleh *Amnesty International* yang bertujuan menegakkan keadilan bagi semua pihak. Ini kemudian sejalan dengan usaha negara untuk menegakkan *sovereignty* dari negara dalam konteks melindungi keadilan bagi warga negaranya. Strategi ini memungkinkan masyarakat sipil global untuk berpengaruh di dalam jalur birokratik dan mempengaruhi keputusan hukum positif oleh negara. Berdasarkan asumsi tersebut, maka strategi ini berpotensi untuk menjadi alternatif strategi dari Gerakan *Occupy* Jakarta untuk merespon permasalahan agraria dan korupsi yang ada di Indonesia. Kondisi sosial, politik dan kultural di Indonesia memungkinkan strategi *lobbying* dilakukan. Sistem politik Indonesia yang menerapkan sistem multi-partai dengan pembagian ideologis memungkinkan untuk terjadi tarik

menarik kepentingan oleh berbagai aktor. Demokrasi yang ada di Indonesia tidak hanya berada pada level substansial melainkan juga dalam hal elektoral menjadikan kepentingan dan dukungan dari masyarakat sipil menjadi penting. Struktur birokrasi yang ada di Indonesia yang ditentukan oleh parlemen membawa konsekuensi dinamika politik yang tinggi. Tidak ada realitas politik tunggal yang harus dianut oleh entitas politik di Indonesia. Hal ini kemudian memudahkan untuk melakukan *lobbying* di antara aktor politik formal. Beberapa penjelasan di atas memberi gambaran mengenai kemungkinan peluang menggunakan strategi *lobbying* dalam merespon permasalahan sosial di Indonesia. Strategi *lobbying* yang menggunakan jalur politik formal untuk menjalankan agendanya menemukan nilai pentingnya dalam konteks permasalahan sosial di Indonesia. Hasil dari analisis terhadap kegagalan strategi *Occupy Wallstreet* mengindikasikan bahwa potensi menggunakan solidaritas yang tidak terstruktur untuk merespon permasalahan agraria dan korupsi akan berakibat kegagalan dalam eksekusi strateginya. Melihat hal ini, strategi *lobbying* yang menggunakan struktur politik formal potensial untuk digunakan.

Kesimpulan

Penjelasan di atas setidaknya mengkonfirmasi argumen Ghemawat bahwa strategi global harus dimaknai dalam konteks perbedaan lintas batas negara. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kegagalan strategi *Occupy Jakarta* dikarenakan tidak memperhatikan dimensi kultur dan ekonomi dalam analisis CAGE Ghemawat. Kegagalan strategi perlawanan *Occupy Jakarta* setidaknya menjelaskan bahwa imitasi dan aplikasi strategi global tanpa memperhatikan dimensi lokal tidak akan berjalan efektif. Gerakan *Occupy Jakarta* mengimitasi strategi *visibility* dalam bentuk protes dari *Occupy Wallstreet*, sedangkan atensi masyarakat Indonesia terkait permasalahan sistem ekonomi kapitalistik tidak terlalu besar. Perhatian besar justru dalam hal konflik agraria dan kasus korupsi. Kedua hal ini yang kemudian menyebabkan strategi perlawanan *visibility* dari *Occupy Jakarta* tidak menemukan titik pentingnya. Hal ini sejalan dengan analisis Ghemawat terkait dimensi kultural dalam CAGE yang melihat produk yang berpengaruh terhadap identitas nasional suatu negara menjadi penting untuk diperhatikan. Hasil akhirnya, dengan menunjukkan kegagalan strategi *Occupy Jakarta* tersebut, didapat kesimpulan bahwa dalam konteks merespon permasalahan sosial di Indonesia, gerakan masyarakat sipil global potensial untuk melakukan strategi *lobbying* daripada strategi *visibility*, *audibility* maupun *networking*.

Catatan Akhir

1. Hyperglobalis merujuk pada konsepsi Held dalam memetakan tiga posisi argumen dalam debat besar globalisasi. Posisi ini berargumen bahwa dalam globalisasi, yang terjadi adalah memudarnya batas-batas antar negara. Interkoneksi aspek politik, sosial dan ekonomi menjadi hal yang tidak dapat dihindari.
2. Paul Hirst, "Global Economy—Myths and Realities," *International Affairs* 73 (3) (1997).
3. Konsep empire adalah rujukan konsep yang digunakan Hardt & Negri untuk menggambarkan kondisi dunia dalam globalisasi. Mengambil analogi empire pada abad pertengahan, konsep ini menjelaskan bahwa dunia dalam globalisasi dikuasai oleh satu kekuatan tunggal yang meredefinisi ulang interaksi sosial dan membentuk ulang sphere dalam konteks geografis.
4. Multitude menurut Hardt & Negri adalah gerakan perlawanan anti globalisasi neoliberal yang berkontraposisi dengan empire.
5. Jan Aart Scholte, "Global Civil Society: Changing the World?," *CSGR Working Paper No. 31/99* (1999).
6. Pankaj Ghemawat, "Semiglobalization and Strategy," *Redefining Global Strategy: Crossing Border in a World Where Differences Still Matter* (Boston: Harvard Business School Press, 2007).
7. Marc Edelman, "Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics," *Annual Review of Anthropology* 30 (2001).
8. Dias Pabyantara Swandita Mahayasa, "Return of The Multitude: Resistensi Ideologis Occupy Wallstreet Terhadap Empire," dilihat 29 Juni 2014, http://dias-pabyantara-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105659-Globalisasi%20dan%20Strategi-Return%20of%20The%20Multitude:%20%20Resistensi%20Ideologis%20Occupy%20Wallstreet%20Terhadap%20Empire.html.
9. *Ibid.*
10. Anita Rachman, "Occupy Jakarta Starts Off Slowly," dilihat 27 Juni 2014, <http://www.thejakartaglobe.com/archive/Occupy-jakarta-starts-off-slowly/>.
11. Abdul Qowi Bastian, "Let's Not Waste Our Time on Occupy Jakarta," dilihat 27 Juni 2014, <http://www.thejakartaglobe.com/archive/lets-not-waste-our-time-on-Occupy-jakarta/>.
12. Aditya Maruli, "Puluhan orang ikuti "Occupy Jakarta"." Dilihat 24 Juni 2014, <http://www.antaranews.com/berita/280521/puluhan-orang-ikuti-Occupy-jakarta>.
13. Rachman, *loc. cit.*
14. Maruli, *loc. cit.*
15. Louise Amoore & Paul Langley, "Ambiguities of Global Civil Society," *Review of International Studies* 30 (1) (2004).
16. Max Lane, "Occupy Jakarta Tidak Laku," dilihat 29 Juni 2014, <http://www.beritasatu.com/makro/16173-max-lane-Occupy-jakarta-tidak-laku.html>.
17. Naomi Wolf, "Revealed: how the FBI coordinated the crackdown on Occupy," dilihat 29 Juni 2014, <http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/dec/29/fbi-coordinated-crackdown-Occupy>.
18. "Occupy Jakarta," *The Jakarta Post*, dilihat 29 Juni 2014, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/01/Occupy-jakarta.html>.

19. Ghemawat, *op.cit.*
20. *Ibid.*
21. Saadikin Gani, "Tantangan Reforma Agraria," dilihat 29 Juni 2014, <http://rumakiri.net>.
22. Sparaiah Saturi, "Tersebar di 98 Kabupaten, Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan," dilihat 29 Juni 2014, <http://www.mongabay.co.id/2013/02/16/tersebar-di-98-kabupaten-konflik-agraria-didominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan/>.
23. "Tersebar di 98 Kabupaten, Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan," Komnasham RI, dilihat 26 Juni 2014, <http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/rekam-media/389-tersebar-di-98-kabupaten-konflik-agraria-didominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan>.
24. Idham Khalid, "Ini Solusi Jokowi Siapkan Permukiman Layak di Jakarta," dilihat 26 Juni 2014, <http://news.detik.com/read/2013/11/11/144423/2409466/10/ini-solusi-jokowi-siapkan-permukiman-layak-di-jakarta?nd771104bcj>.
25. "RI "Juara" Korupsi Asia Tenggara menurut Survei World Justice Project," antikorupsi.org 2011). Antikorupsi.org, dilihat 26 Juni 2014, <http://www.antikorupsi.org/en/content/ri-%E2%80%99%E2%80%99juara%E2%80%99%E2%80%99-korupsi-asia-tenggara-menurut-survei-world-justice-project>.
26. Esthi Maharani, "Indonesia Peringkat 64 Negara Paling Korup," dilihat 26 Juni 2014, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/10/n6xwut-indonesia-peringkat-64-negara-paling-korup>.
27. "Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 31 Maret 2014)," kpk.go.id 2014) kpk.go.id, dilihat 26 Juni 2014, <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>.
28. Maruli, *loc. cit.*
29. Siregar (2011).
30. Martin Bagya Kertiyasa, "Nih, 11 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar," dilihat 26 Juni 2014, <http://economy.okezone.com/read/2013/12/12/20/911142/nih-11-sektor-penyumbang-pajak-terbesar>.
31. Lane, *loc. cit.*
32. V.N. Bhattacharya, "What Strategy is Not," *European Business Forum*. No. 30. (2007).
33. Michael E. Porter, "What Is Strategy?," *Harvard Business Review* (November-Desember, 1996): 61-78.
34. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2013," BPS, dilihat 10 Juli 2014, http://www.bps.go.id/brs_file/naker_06mei13.pdf diakses pada
35. Edelman, *op. cit.*
36. Sigit Budiarto, "UU Desa Dan Persoalan Agraria," dilihat 10 Juli 2014, <http://www.berdikarionline.com/opini/20140705/uu-desa-dan-persoalan-agraria.html>.
37. Ann M Florini and P.J. Simmons, *What the Worlds need Now* (t.t).

Daftar Referensi

- Amoore, Louise & Langley, Paul. Ambiguities of Global Civil Society, *Review of International Studies* 30 (1) (2004).
- AntiKorupsi.org. "RI "Juara" Korupsi Asia Tenggara menurut Survei World Justice Project." Dilihat 26 Juni 2014.
<http://www.antikorupsi.org/en/content/ri-%E2%80%99%E2%80%99juara%E2%80%99%E2%80%99-korupsi-asia-tenggara-menurut-survei-world-justice-project>.
- Bastian, Abdul Qowi. "Let's Not Waste Our Time on Occupy Jakarta." Dilihat 27 Juni 2014. <http://www.thejakartaglobe.com/archive/lets-not-waste-our-time-on-Occupy-jakarta/>
- Bhattacharya, V.N. "What Strategy is Not." *European Business Forum*. No. 30. (2007).
- BPS. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2013." Dilihat 10 Juli 2014. http://www.bps.go.id/brs_file/naker_06mei13.pdf.
- Budiarto, Sigit. "UU Desa Dan Persoalan Agraria." Dilihat 10 Juli 2014. <http://www.berdikarionline.com/opini/20140705/uu-desa-dan-persoalan-agraria.html>.
- Deardorff, Alan V. "What Might Globalization's Critics Believe?." *the World Economy* (26) (2003).
- Edelman, Marc. Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics, *Annual Review of Anthropology* 30 (2001).
- Florini, Ann M and P.J. Simmons. *What the Worlds need Now*. (t.t).
- Gani, Saadikin. "Tantangan Reforma Agraria." Dilhat 29 Juni 2014. <http://rumakiri.net>.
- Ghemawat, Pankaj. "Semiglobalization and Strategy." *Redefining Global Strategy: Crossing Border in a World Where Differences Still Matter*, Boston: Harvard Business School Press, 2007.
- Hardt, Michael dan A. Negri. "Biopolitical Production." *Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Hardt, Michael dan A. Negri. 2004. "Resistance." dalam *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, New York: the Penguin Press.
- Hirst, Paul. "Global Economy—Myths and Realities." *International Affairs* 73 (3) (1997).
- Kertiyasa, Martin Bagya. "Nih, 11 Sektor Penyumbang Pajak Terbesar." Dilihat 26 Juni 2014.

<http://economy.okezone.com/read/2013/12/12/20/911142/nih-11-sektor-penyumbang-pajak-terbesar>.

Khalid, Idham. "Ini Solusi Jokowi Siapkan Permukiman Layak di Jakarta." Dilihat 26 Juni 2014.

<http://news.detik.com/read/2013/11/11/144423/2409466/10/ini-solusi-jokowi-siapkan-permukiman-layak-di-jakarta?nd771104bcj>.

Komnasham RI. "Tersebar di 98 Kabupaten, Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan." Dilihat 26 Juni 2014.

<http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/rekam-media/389-tersebar-di-98-kabupaten-konflik-agraria-didominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan>.

Kpk.go.id. "Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 31 Maret 2014)." Dilihat 26 Juni 2014. <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>.

Lane, Max. "Occupy Jakarta Tidak Laku." Dilihat 29 Juni 2014.

<http://www.beritasatu.com/makro/16173-max-lane-Occupy-jakarta-tidak-laku.html>.

Maharani, Esthi. "Indonesia Peringkat 64 Negara Paling Korup." Dilihat 26 Juni 2014.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/10/n6xwut-indonesia-peringkat-64-negara-paling-korup>.

Mahayasa, Dias Pabyantara Swandita. "Return of The Multitude: Resistensi Ideologis Occupy Wallstreet Terhadap Empire." Dilihat 29 Juni 2014.

http://dias-pabyantara-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105659-Globalisasi%20dan%20Strategi-Return%20of%20The%20Multitude:%20%20Resistensi%20Ideologis%20Occupy%20Wallstreet%20Terhadap%20Empire.html.

Maruli, Aditya. "Puluhan orang ikuti "Occupy Jakarta"." Dilihat 24 Juni 2014.

<http://www.antarane.ws.com/berita/280521/puluhan-orang-ikuti-Occupy-jakarta>.

Porter, Michael E. "What Is Strategy?." *Harvard Business Review* (November-Desember, 1996): 61-78.

Pozo-Martin, Gonzo dan A. Anievas. "Historical Materialism and Globalization: Review Essay." *Capital & Class* (88) (2006).

Rachman, Anita. "Occupy Jakarta Starts Off Slowly." Dilihat 27 Juni 2014.

<http://www.thejakartaglobe.com/archive/Occupy-jakarta-starts-off-slowly/>.

Rotschild, Emma. "Globalization and the Return of History." *Foreign Policy* 115 (1999).

Saturi, Sparaiyah. "Tersebar di 98 Kabupaten, Konflik Agraria Didominasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan." Dilihat 29 Juni 2014.

<http://www.mongabay.co.id/2013/02/16/tersebar-di-98-kabupaten-konflik-agraria-didominasi-sektor-perkebunan-dan-kehutanan/>.

Scholte, Jan Aart. "Global Civil Society: Changing the World?." *CSGR Working Paper* No. 31/99 (1999).

The Jakarta Post. "Occupy Jakarta." Dilihat 29 Juni 2014.

<http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/01/Occupy-jakarta.html>.

Wallerstein, Immanuel. "Globalization or the Age of Transition: A LongTerm View of the Trajectory of the World-System." *International Sociology* 15 (2) (2000).

Wolf, Naomi. "Revealed: how the FBI coordinated the crackdown on Occupy." Dilihat 29 Juni 2014.

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/dec/29/fbi-coordinated-crackdown-Occupy>.